Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

RESEARCH ARTICLE

Pendidikan, Filantropi, dan Emansipasi: Gerakan Pengasuhan Anak Yatim Muhammadiyah di Hindia Belanda (1921–1930-an)

Annisaa Khansa Labibah
Prodi. Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Correspondence Author : annisaa.labibah.fis@um.ac.id

To cite this article: Labibah, A. K. (2026). Pendidikan, filantropi, dan emansipasi: Gerakan Pengasuhan Anak Yatim Muhammadiyah di Hindia Belanda (1921–1930-an). *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 9*(1), 41–50. https://doi.org/10.17509/historia.v9i1.90349.

Naskah diterima : 19 September 2025, Naskah direvisi : 20 April 2026, Naskah disetujui : 30 April 2026

Abstract
This study investigates the development of child care and education for orphans and abandoned children in the Dutch East Indies, focusing on Muhammadiyah and its women's wing, Aisyiyah, since 1921. Positioned within the frameworks of Islamic philanthropy, colonial child policy, and transnational humanitarianism, the research examines how colonial welfare systems constructed racialized and exclusionary practices, particularly toward Eurasian and Indigenous children. This study employs historical methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, using primary sources such as colonial archives, contemporary newspapers, and Muhammadiyah organizational documents, complemented by secondary literature. The findings show that Muhammadiyah developed a community-based and faith-driven model of social welfare that emphasized education, moral formation, and social responsibility. Moreover, its engagement with international actors such as Pro Juventute reflects an emerging transnational awareness in child welfare practices. Drawing on Freirean and Fanonian perspectives, this study argues that Muhammadiyah's initiatives functioned not only as social services but also as forms of socio-cultural resistance to colonial domination. This study contributes to social welfare historiography by integrating Islamic philanthropy, colonial child policy, and transnational humanitarianism into a single analytical framework.

Keywords: Aisyiyah; Colonial Child Policy; Islamic Philanthropy; Social Welfare History; Transnational Humanitarianism.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji peran Muhammadiyah dalam pengasuhan dan pendidikan anak yatim serta terlantar di Hindia Belanda sejak 1921. Berbeda dengan model kolonial yang bersifat diskriminatif dan berorientasi pada kontrol sosial, Muhammadiyah melalui Aisyiyah mengembangkan sistem pengasuhan berbasis filantropi Islam, pendidikan, dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan memanfaatkan sumber primer berupa arsip kolonial, surat kabar sezaman, serta dokumen Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panti asuhan Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai alternatif sistem kesejahteraan yang lebih inklusif. Selain itu, keterhubungan dengan organisasi internasional seperti *Pro Juventute* menunjukkan bahwa praktik pengasuhan ini memiliki dimensi transnasional. Dengan menggunakan perspektif filantropi Islam, pendidikan kritis, dan transnasionalisme, penelitian ini menegaskan bahwa pengasuhan Muhammadiyah merupakan bentuk resistensi kultural terhadap kolonialisme sekaligus kontribusi penting dalam sejarah kesejahteraan sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Aisyiyah; Filantropi Islam; Humanitarianisme Transnasional; Kesejahteraan Sosial; Kebijakan Anak Kolonial.

PENDAHULUAN

Kajian mengenai kesejahteraan anak dalam konteks kolonial menunjukkan bahwa praktik pengasuhan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang bekerja dalam struktur kolonial. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa negara kolonial tidak hanya mengatur aspek ekonomi dan politik, tetapi juga kehidupan sosial, termasuk dalam mengonstruksi anak sebagai subjek yang perlu dikontrol dan dibentuk sesuai kepentingan kolonial (Stoler, 2002; Dirks, 2011). Anak-anak yatim, terlantar, dan terutama anak hasil perkawinan campuran (Eurasian) dipandang sebagai kelompok rentan sekaligus problematis, sehingga menjadi sasaran kebijakan yang bersifat diskriminatif dan eksklusif. Dalam praktiknya, lembaga pengasuhan seperti panti asuhan kolonial tidak semata bertujuan untuk kesejahteraan anak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga batas-batas rasial dan identitas kolonial (Kaur Khalsa, 2014; Luttikhuis & Moses, 2012). Dengan demikian, pengasuhan anak dalam konteks kolonial perlu dipahami tidak hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan reproduksi kekuasaan kolonial.

Panti asuhan di Hindia Belanda mulai berkembang sejak abad ke-19, salah satunya adalah Parapattan Orphan Asylum yang didirikan oleh Welter Henry Medhurst pada 17 Oktober 1832 dengan tujuan menampung anak-anak hasil perkawinan campuran yang terlantar. Perkembangan selanjutnya terlihat pada tahun 1854 melalui pendirian panti asuhan oleh Emmanuel Francis, Direktur De Javasche Bank, yang ditujukan bagi anak-anak prajurit yang gugur dalam perang. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam konteks kolonial tidak hanya didorong oleh motif kemanusiaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sosial-politik, terutama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat kolonial. Pemerintah kolonial bahkan memberikan subsidi terhadap lembaga pengasuhan anak, dengan pertimbangan bahwa anak-anak terlantar berpotensi menjadi sumber gangguan sosial dan kriminalitas (Dirks, 2011; Kaur Khalsa, 2014). Dengan demikian, panti asuhan kolonial dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang dilembagakan.

Kepedulian terhadap anak-anak terlantar tersebut juga dapat dilihat dalam kerangka filantropi, yaitu praktik pemberian bantuan yang bertujuan untuk kepentingan publik. Dalam banyak kasus, praktik filantropi tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melalui organisasi keagamaan yang terstruktur (Singer, 2008; Benthall, 2016). Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern yang berdiri pada 1912 memainkan peran penting dalam mengembangkan filantropi berbasis komunitas. Sejak sekitar tahun 1915, Muhammadiyah mulai memfokuskan kegiatannya pada bidang sosial dan pendidikan melalui pembentukan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), yang bergerak dalam pelayanan sosial seperti santunan anak yatim dan pelayanan kesehatan. Praktik pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan kemandirian, yang dalam perspektif Fanon (1963) dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan pendidikan alternatif bagi masyarakat pribumi yang tidak sekadar mereproduksi nilai-nilai kolonial, melainkan membuka ruang bagi pembebasan dan transformasi sosial.

Selanjutnya pada tahun 1921, Muhammadiyah mendirikan panti asuhan pertamanya di bawah naungan Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah. Pada tahap awal, sistem pengasuhan yang diterapkan masih berbasis komunitas, yaitu dengan menempatkan anak-anak asuh dalam keluarga anggota Muhammadiyah yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pendidikan mereka. Model ini mencerminkan nilai solidaritas sosial dan praktik filantropi berbasis keluarga yang berbeda dari pola institusional kolonial yang cenderung bersifat terpusat. Baru pada tahun 1928, panti asuhan Muhammadiyah berkembang menjadi sistem yang lebih terorganisasi dengan pembagian berbasis gender, yaitu Panti Asuhan Putra dan Panti Asuhan Putri, yang menandai proses institusionalisasi pengasuhan anak dalam lingkungan Muhammadiyah.

Seiring dengan perkembangan tersebut, cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai wilayah, khususnya di Jawa, mulai mendirikan panti asuhan sebagai bagian dari ekspansi gerakan sosial-keagamaan ini. Di Surakarta, misalnya, berdiri Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah (PAKYM) pada tahun 1930, yang menekankan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, termasuk penguatan hafalan Al-Qur'an. Di Batavia pada tahun 1931 didirikan Roemah Piatoe Muslim, sementara di Malang pada tahun 1934 berdiri Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah (PAYM), yang bahkan memperoleh dukungan finansial dari Ratu Wilhelmina pada tahun 1937. Perkembangan ini menunjukkan bahwa panti asuhan Muhammadiyah tidak hanya berkembang secara lokal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang lebih luas, termasuk dari aktor kolonial, sehingga memperkuat posisinya sebagai lembaga kesejahteraan alternatif di tengah struktur kolonial.

Fenomena berkembangnya panti asuhan Muhammadiyah di berbagai wilayah dapat dipahami

dalam kerangka transnasionalisme, di mana terdapat kesadaran kolektif lintas wilayah mengenai pentingnya pengasuhan anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial keagamaan (Levitt & Glick Schiller, 2004; Benthall, 2016). Selain Muhammadiyah, keberadaan organisasi internasional seperti Pro Juventute yang berdiri di Swiss sejak 1896 juga menunjukkan bahwa isu kesejahteraan anak telah menjadi perhatian global.

Di Hindia Belanda, Pro Juventute hadir sejak 1916 di Batavia dengan anggota yang terdiri dari orang Eropa, elit bumiputera, serta komunitas Tionghoa dan Arab. Pada tahun 1932, organisasi ini telah berkembang dengan membuka cabang di berbagai kota seperti Malang, Surabaya, dan Medan. Kehadiran Pro Juventute memperlihatkan adanya keterhubungan antara praktik pengasuhan anak di tingkat lokal dengan jaringan kemanusiaan internasional, yang menempatkan isu anak terlantar sebagai bagian dari agenda global mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Pro Juventute tidak hanya berperan sebagai organisasi filantropi internasional, tetapi juga terlibat dalam pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak di Hindia Belanda, termasuk panti asuhan Muhammadiyah. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa praktik kesejahteraan anak di wilayah kolonial tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jaringan kemanusiaan global yang lebih luas (Rodogno, 2012; Barnett, 2011). Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi pergerakan berbasis agama mulai terlibat dalam isu kesejahteraan anak dan remaja terlantar melalui pendekatan filantropi Islam. Secara konseptual, penelitian ini menggunakan dua kerangka utama, yaitu filantropi dan transnasionalisme, untuk menjelaskan bahwa kepedulian terhadap anak-anak terlantar pada masa kolonial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari dinamika sosial yang berkaitan dengan perubahan kebijakan kolonial, termasuk implementasi politik etis pada awal abad ke-20.

Kajian tentang pendidikan dan pengasuhan anak dalam konteks kolonial telah banyak dilakukan, terutama dengan menyoroti posisi anak-anak sebagai kelompok rentan dalam struktur kekuasaan kolonial. Dirks (2011) menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda memandang anak-anak yatim, terlantar, dan anak hasil perkawinan campuran sebagai potensi ancaman sosial, sehingga mendirikan panti asuhan dan lembaga re-edukasi. Namun, pola pengasuhan yang diterapkan sarat diskriminasi rasial dan berfungsi untuk mempertahankan hierarki kolonial (Stoler, 2002). Dalam konteks hukum dan peradilan, Kaur Khalsa (2014) menegaskan bahwa interaksi antara anak-anak, orang tua, dan aparat kolonial sering kali diwarnai miskomunikasi, yang pada akhirnya mempertegas posisi anak sebagai objek kontrol negara.

Kajian teori pendidikan kritis memberikan perspektif penting dalam memahami praktik pengasuhan alternatif. Freire (1968) menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana pembebasan melalui pengembangan kesadaran kritis, sementara Fanon (1963) melihat pendidikan kolonial sebagai instrumen dominasi yang mereproduksi ketimpangan, sehingga diperlukan model pendidikan baru yang bersifat emansipatoris. Perspektif ini relevan untuk membaca praktik pendidikan di panti asuhan Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya resistensi terhadap dominasi kolonial.

Kajian tentang filantropi Islam juga menunjukkan kontribusi penting organisasi keagamaan dalam membangun sistem kesejahteraan alternatif. Syaifullah (2010) menjelaskan bahwa Muhammadiyah mengembangkan amal usaha pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk filantropi modern yang berorientasi pada transformasi sosial. Hal ini sejalan dengan Singer (2008) dan Benthall (2016) yang menekankan bahwa filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai praktik amal, tetapi juga sebagai mekanisme intervensi sosial dalam menghadapi ketimpangan. Nashir (2010) melihat Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi Islam yang menjadikan pendidikan sebagai sarana dakwah dan modernisasi, sementara Shihab (1998) menunjukkan bahwa amal sosial Muhammadiyah juga memiliki dimensi ideologis dalam merespons dinamika keagamaan di masa kolonial.

Selain itu, praktik transnasionalisme dalam isu kesejahteraan anak semakin mendapat perhatian dalam kajian global. Levitt dan Glick Schiller (2004) menekankan bahwa aktor non-negara memainkan peran penting dalam membentuk jaringan sosial lintas batas negara. Dalam konteks ini, keterlibatan Pro Juventute di Hindia Belanda menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan bagian dari agenda internasional mengenai perlindungan anak dan reformasi sosial (Rodogno, 2012). Dengan demikian, praktik pengasuhan anak oleh Muhammadiyah dapat dipahami sebagai bagian dari jaringan transnasional yang menghubungkan gerakan lokal dengan dinamika global.

Adapun penelitian tentang pengasuhan anak di lembaga Islam menunjukkan dimensi praksis dari sistem pengasuhan tersebut. Murestiyanto (2015) menemukan bahwa panti asuhan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan identitas keagamaan. Rosyida (2016)

menegaskan bahwa relasi antar anak dalam panti asuhan mencerminkan fungsi keluarga dalam konteks institusional. Temuan ini memperkuat argumen bahwa panti asuhan Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai lembaga kesejahteraan, tetapi juga sebagai ruang sosialisasi dan pendidikan. Dari berbagai kajian tersebut, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi celah studi dengan menghubungkan dinamika kolonialisme, filantropi Islam, dan transnasionalisme dalam praktik pengasuhan anak. Dengan menggunakan perspektif Freire dan Fanon, penelitian ini tidak hanya melihat pengasuhan sebagai praktik sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai strategi pembebasan dan resistensi terhadap hegemoni kolonial.

Meskipun kajian tentang filantropi Islam, Muhammadiyah, dan kesejahteraan anak telah berkembang, sebagian besar studi masih membahasnya secara terpisah. Kajian filantropi Islam lebih banyak menyoroti zakat, wakaf, dan lembaga sosial modern, sementara studi tentang anak dalam konteks kolonial lebih sering menekankan kontrol negara, hukum kolonial, dan diskriminasi rasial. Di sisi lain, penelitian tentang Muhammadiyah umumnya menempatkan organisasi ini sebagai gerakan dakwah, pendidikan, dan reformasi Islam, tetapi belum banyak yang secara khusus menghubungkan peran Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam pengasuhan anak yatim dengan kebijakan kolonial serta jaringan kemanusiaan transnasional. Padahal, studi mutakhir tentang filantropi Islam menunjukkan bahwa praktik amal keagamaan dapat menjadi instrumen kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas, dan respons terhadap ketimpangan struktural (Latief, 2013; Huda, 2023). Dengan demikian, artikel ini memiliki kebaruan karena menempatkan panti asuhan Muhammadiyah bukan hanya sebagai lembaga sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan antara filantropi Islam, kebijakan kolonial tentang anak, dan kesadaran kemanusiaan lintas batas (Huda, 2023; Latief, 2013). Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) bagaimana Muhammadiyah mengembangkan model pengasuhan alternatif dalam konteks kolonial, dan (2) sejauh mana praktik tersebut dapat dipahami dalam kerangka filantropi Islam dan transnasionalisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji praktik pengasuhan dan pendidikan anak yatim dalam konteks kolonial di Hindia Belanda, khususnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah. Metode sejarah dipilih karena memungkinkan penelusuran perubahan sosial secara diakronik serta analisis hubungan antara kebijakan kolonial, praktik filantropi, dan dinamika masyarakat (Kuntowijoyo, 2018; Tosh, 2015; Howell & Prevenier, 2001). Tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer yang digunakan meliputi arsip kolonial (seperti laporan pemerintah Hindia Belanda, regulasi terkait kesejahteraan anak, dan dokumen lembaga re-edukasi), surat kabar sezaman (misalnya *De Locomotief, Bataviaasch Nieuwsblad*, dan surat kabar pribumi seperti *Kaoem Moeda*), serta dokumen organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah, termasuk laporan kegiatan, arsip panti asuhan, dan publikasi internal. Selain itu, laporan organisasi internasional seperti Pro Juventute juga menjadi sumber penting untuk melihat keterhubungan antara praktik lokal dan jaringan kemanusiaan global. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, konteks temporal, serta representasi perspektif yang beragam, baik dari aktor kolonial maupun masyarakat pribumi.

Tahap kritik sumber dilakukan melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal bertujuan menguji keaslian dan otentisitas dokumen, sementara kritik internal digunakan untuk menilai kredibilitas isi, bias penulis, serta konteks produksi sumber (Howell & Prevenier, 2001). Hal ini menjadi penting mengingat banyak sumber kolonial merefleksikan perspektif kekuasaan, sehingga memerlukan pembacaan kritis agar tidak mereproduksi narasi dominan secara tidak reflektif.

Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, relasi, dan makna sosial dari data yang diperoleh. Dalam tahap ini, penelitian menggunakan kerangka filantropi Islam dan transnasionalisme untuk memahami praktik pengasuhan Muhammadiyah sebagai bagian dari respons lokal terhadap struktur kolonial sekaligus sebagai bagian dari dinamika global kesejahteraan anak (Levitt & Glick Schiller, 2004; Benthall, 2016). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjelaskan keterkaitan antara praktik lokal, ideologi keagamaan, dan jaringan internasional.

Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil analisis ke dalam narasi historis yang sistematis, kritis, dan argumentatif. Pada tahap ini, penulis tidak hanya merekonstruksi perkembangan panti asuhan Muhammadiyah, tetapi juga menafsirkan perannya

sebagai bentuk respons terhadap kebijakan kolonial dan sebagai strategi sosial-keagamaan dalam membangun sistem kesejahteraan alternatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi peristiwa masa lalu, tetapi juga memberikan pemaknaan yang lebih luas mengenai relasi antara kolonialisme, filantropi Islam, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini menyadari bahwa sebagian besar sumber berasal dari arsip kolonial yang merepresentasikan perspektif kekuasaan, sehingga interpretasi dilakukan secara kritis untuk menghindari reproduksi bias kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah Organisasi Pergerakan Islam Pada Masa Hindia Belanda

Muhammadiyah lahir pada tahun 1912 sebagai bagian dari gelombang kebangkitan Islam modern di Jawa yang tidak terlepas dari pengaruh reformisme Islam global, khususnya dari Timur Tengah. Terinspirasi oleh gagasan pembaruan Islam yang berkembang di Mesir, KH Ahmad Dahlan berupaya mengembalikan ajaran Islam pada sumber otentiknya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus merespons tantangan kolonialisme dan modernitas yang dihadapi masyarakat pribumi. Dalam konteks ini, Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai gerakan dakwah, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial sebagai strategi pembaruan masyarakat (Fauzia, 2013; Latief, 2014). Pada dekade 1920-an, Muhammadiyah telah mengembangkan jaringan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial yang tersebar di berbagai wilayah Hindia Belanda, menunjukkan kemampuannya dalam membangun infrastruktur sosial alternatif di luar sistem kolonial (Dirks, 2011).

Berbeda dengan organisasi pergerakan lain seperti Sarekat Islam atau Boedi Oetomo yang lebih menekankan dimensi politik dan advokasi kebangsaan, Muhammadiyah memilih jalur pendidikan dan pelayanan sosial sebagai strategi perubahan. Pilihan ini bukan sekadar strategi pragmatis, tetapi mencerminkan orientasi ideologis yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama perubahan sosial (Nashir, 2010). Melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang didirikan sejak 1915, Muhammadiyah mengembangkan basis filantropi Islam yang terorganisasi dan berkelanjutan. Dalam perspektif kajian filantropi Islam kontemporer, praktik ini menunjukkan bahwa amal sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan karitatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan dan transformasi sosial (Singer, 2008; Benthall, 2016).

Dalam konteks kolonial, pemerintah Hindia Belanda pada awalnya memandang Muhammadiyah sebagai organisasi yang relatif netral secara politik. Persepsi ini memberikan ruang bagi Muhammadiyah untuk berkembang lebih leluasa dalam bidang pendidikan dan sosial, termasuk mendirikan sekolah dan panti asuhan. Hingga akhir 1930-an, Muhammadiyah tercatat memiliki lebih dari 850 cabang dengan jumlah anggota mencapai sekitar 250.000 orang, menjadikannya salah satu kekuatan sosial-keagamaan terbesar di Hindia Belanda (Dirks, 2011). Skala organisasi yang luas ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga sebagai jaringan sosial yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Pendirian panti asuhan pada tahun 1921 menjadi salah satu bentuk konkret respons Muhammadiyah terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pribumi, khususnya terkait anak-anak yatim dan terlantar. Dalam perspektif Muhammadiyah, anak-anak tersebut tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai generasi masa depan yang harus dipersiapkan melalui pendidikan dan pembinaan moral. Berbeda dengan model pengasuhan kolonial yang cenderung berorientasi pada kontrol sosial dan disiplin, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan yang menekankan pendidikan agama, keterampilan hidup, dan pembentukan karakter sebagai bagian dari proses pemberdayaan (Murestiyanto, 2015; Latief, 2014). Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma pengasuhan yang bersifat represif menuju model yang lebih edukatif dan emansipatoris.

Kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan dalam bidang pengasuhan anak juga memperlihatkan kekuatan filantropi berbasis komunitas yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Filantropi Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kolektif masyarakat untuk terlibat dalam upaya kesejahteraan sosial. Dalam kerangka pendidikan kritis, praktik ini sejalan dengan gagasan Freire (1968) yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pengembangan kesadaran kritis. Dengan demikian, amal sosial Muhammadiyah dapat dipahami tidak hanya sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk resistensi kultural terhadap dominasi kolonial yang berupaya membangun sistem sosial alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam kajian filantropi Islam kontemporer, praktik sosial Muhammadiyah dapat dipahami bukan sekadar sebagai kegiatan amal, tetapi sebagai bentuk

pembangunan kapasitas masyarakat. Latief menunjukkan bahwa filantropi Islam di Indonesia memiliki hubungan erat dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan penguatan lembaga masyarakat sipil. Dalam konteks ini, PKO dan panti asuhan Muhammadiyah dapat dibaca sebagai bentuk awal institusionalisasi filantropi Islam modern di Indonesia. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya merespons kemiskinan secara karitatif, tetapi juga membangun sistem sosial yang lebih terorganisasi melalui pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak (Latief, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari civil society yang mengisi kekosongan peran negara kolonial dalam bidang kesejahteraan sosial

Anak-Anak dan Remaja Korban Kolonialisme

Kolonialisme di Hindia Belanda menghasilkan realitas sosial yang kompleks dan sering kali keras bagi anak-anak dan remaja. Dampak perang kolonial, praktik perkawinan campuran, serta kemiskinan struktural telah menciptakan kelompok anak-anak yatim, terlantar, dan terpinggirkan yang berada dalam posisi rentan secara sosial maupun kultural. Dalam banyak kasus, anak-anak ini tidak hanya kehilangan dukungan keluarga, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang memperburuk kondisi mereka. Pemerintah kolonial memandang kelompok ini sebagai masalah sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas dan ketertiban kolonial, sehingga intervensi negara terhadap pengasuhan anak menjadi bagian dari strategi pengendalian sosial (Dirks, 2011; Stoler, 2002). Sejak abad ke-19, pendirian panti asuhan seperti Parapattan Orphan Asylum (1832) menunjukkan upaya institusional untuk mengelola populasi anak-anak Eurasia yang dianggap berada di antara dua dunia sosial yang berbeda.

Namun demikian, praktik pengasuhan dalam sistem kolonial tidak bersifat netral. Pola pengasuhan yang diterapkan sarat dengan diskriminasi rasial dan berorientasi pada pelestarian hierarki kolonial. Anak-anak Eurasia, misalnya, dibatasi interaksinya dengan pengasuh bumiputera karena dianggap dapat "menghilangkan" identitas ke-Eropaannya. Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran kolonial terhadap metissage, yaitu terbentuknya identitas hibrida yang berpotensi mengaburkan batas rasial dan sosial (Kaur Khalsa, 2014; Stoler, 2002). Dalam perspektif ini, panti asuhan kolonial tidak hanya berfungsi sebagai lembaga kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen ideologis untuk mempertahankan dominasi kolonial melalui kontrol atas tubuh, identitas, dan relasi sosial anak-anak. Dalam perspektif sejarah kolonial yang lebih luas, pengasuhan anak sering menjadi bagian dari proyek "pemberadaban" kolonial. Banyak kebijakan kolonial berusaha memisahkan anak-anak dari keluarga, komunitas, agama, atau budaya asalnya melalui sekolah berasrama, panti asuhan, lembaga adopsi, dan lembaga pengasuhan lain. Praktik semacam ini tidak hanya terjadi di Hindia Belanda, tetapi juga menjadi pola umum dalam berbagai wilayah kolonial. Oleh karena itu, panti asuhan kolonial perlu dibaca bukan hanya sebagai lembaga perlindungan anak, tetapi juga sebagai ruang produksi identitas kolonial, tempat anak-anak dibentuk agar sesuai dengan tatanan sosial yang dikehendaki negara colonial (Mak, 2022).

Selain anak-anak Eurasia, anak-anak pribumi juga mengalami dampak signifikan dari sistem kolonial. Perang, kerja paksa, dan kemiskinan struktural menyebabkan banyak anak kehilangan orang tua dan akses terhadap pendidikan. Pemerintah kolonial kemudian menempatkan sebagian dari mereka dalam lembaga re-edukasi, terutama jika dianggap melakukan pelanggaran sosial. Namun, pendekatan yang digunakan lebih menekankan disiplin, kerja, dan kepatuhan daripada pengembangan potensi individu (Dirks, 2011). Hal ini sejalan dengan kritik Fanon (1963) yang menyatakan bahwa pendidikan kolonial cenderung mereproduksi struktur penindasan dengan membentuk subjek yang patuh terhadap kekuasaan, bukan individu yang merdeka secara intelektual.

Lebih jauh, anak-anak terlantar sering kali dikonstruksikan sebagai ancaman potensial terhadap keamanan sosial karena diasosiasikan dengan kriminalitas dan deviasi sosial. Stigmatisasi ini tidak hanya memperburuk kondisi mereka, tetapi juga melegitimasi intervensi represif negara dalam bentuk pengawasan dan pengendalian. Dalam konteks ini, lembaga pengasuhan kolonial lebih berfungsi sebagai sarana stabilisasi sosial daripada pemberdayaan anak. Padahal, bagi masyarakat pribumi, persoalan utama tidak hanya terletak pada kenakalan remaja, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan modern dan peluang mobilitas sosial. Pernyataan Van der Meulen pada 1922 yang mengakui pentingnya pendidikan bagi kemajuan pribumi menunjukkan adanya kesadaran akan kesenjangan tersebut, meskipun tidak diikuti oleh kebijakan yang inklusif (Dirks, 2011).

Dengan demikian, kolonialisme menciptakan dualisme dalam praktik pengasuhan anak: di satu sisi menghadirkan institusi seperti panti asuhan dan lembaga re-edukasi, tetapi di sisi lain tetap mempertahankan struktur diskriminatif berbasis ras dan kekuasaan. Anak-anak pribumi dan Eurasia diperlakukan secara berbeda dalam sistem tersebut, dan

pendidikan lebih difungsikan sebagai alat kontrol sosial daripada sarana pemberdayaan. Dalam konteks inilah kehadiran Muhammadiyah menjadi signifikan, karena menawarkan model pengasuhan alternatif yang lebih inklusif, berbasis nilai-nilai Islam, serta berorientasi pada pendidikan dan pembentukan karakter, yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pribumi (Soetjito, 2018; Latief, 2014). Temuan ini sejalan dengan studi kolonial global yang menunjukkan bahwa anak-anak sering menjadi objek "biopolitical control" dalam proyek kolonial (Stoler, 2002).

Pengasuhan dan Pendidikan Pantiasuhan Muhammadiyah

Panti asuhan Muhammadiyah pertama kali berdiri pada tahun 1921 di bawah naungan Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah. Pada tahap awal, pola pengasuhan yang diterapkan masih berbasis komunitas, yaitu dengan menitipkan anak-anak asuh kepada keluarga anggota Muhammadiyah. Model ini mencerminkan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat Muslim, sekaligus menjadi pembeda utama dari sistem pengasuhan kolonial yang cenderung institusional dan berorientasi pada kontrol (Latief, 2014; Fauzia, 2013). Baru pada tahun 1928, Muhammadiyah mulai mengembangkan sistem panti asuhan berbasis asrama yang lebih terorganisasi dengan pemisahan antara anak laki-laki dan perempuan. Model ini kemudian direplikasi di berbagai wilayah seperti Surakarta (1930), Batavia (1931), dan Malang (1934), menunjukkan adanya proses institusionalisasi yang memperkuat jaringan filantropi Muhammadiyah (Dirks, 2011; Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1962).

Pendidikan yang dikembangkan di panti asuhan Muhammadiyah menekankan integrasi antara nilai-nilai agama, keterampilan praktis, dan kemandirian individu. Anak-anak tidak hanya diajarkan ajaran Islam dan hafalan Al-Qur'an, tetapi juga dibekali keterampilan hidup yang memungkinkan mereka beradaptasi secara mandiri dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dengan pendidikan kolonial yang lebih berorientasi pada pembentukan tenaga kerja yang patuh dan terdisiplin (Fanon, 1963). Dalam perspektif pendidikan kritis, model pendidikan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai upaya membangun kesadaran dan kapasitas individu untuk keluar dari struktur penindasan, sebagaimana ditegaskan oleh Freire (1968) bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pembebasan (*education as liberation*). Dalam konteks Muhammadiyah, pendidikan tidak hanya menjadi instrumen dakwah, tetapi juga strategi transformasi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (Nashir, 2010).

Selain sebagai lembaga pendidikan, panti asuhan Muhammadiyah juga berfungsi sebagai pusat filantropi Islam yang terorganisasi. Pendanaan operasional diperoleh dari donasi anggota, masyarakat, serta dalam beberapa kasus dari aktor kolonial. Misalnya, Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah (PAYM) Malang pernah menerima bantuan sebesar 250 gulden dari Ratu Wilhelmina pada tahun 1937. Fakta ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah mampu membangun legitimasi sosial yang melampaui batas komunitasnya, sehingga memperkuat posisinya sebagai lembaga filantropi modern yang diakui secara luas (Murestiyanto, 2015; Syaifullah, 2010). Dalam kajian filantropi Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik amal tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pembangunan sosial dan penguatan kapasitas komunitas (Singer, 2008; Benthall, 2016).

Keterhubungan Muhammadiyah dengan dinamika global juga terlihat melalui interaksinya dengan organisasi internasional seperti Pro Juventute. Sejak hadir di Batavia pada tahun 1916, organisasi ini terlibat dalam pemantauan dan dukungan terhadap lembaga pengasuhan anak, termasuk panti asuhan Muhammadiyah. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa isu pengasuhan anak yatim dan terlantar tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi bagian dari agenda kemanusiaan global. Dalam perspektif transnasionalisme, kondisi ini mencerminkan adanya jejaring lintas batas yang menghubungkan aktor lokal dengan sistem global dalam isu kesejahteraan anak (Levitt & Glick Schiller, 2004; Rodogno, 2012). Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai aktor lokal, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan kemanusiaan internasional yang lebih luas.

Dengan demikian, panti asuhan Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai arena pembentukan alternatif terhadap sistem pengasuhan kolonial yang diskriminatif. Melalui integrasi pendidikan agama, keterampilan hidup, dan nilai-nilai kemandirian, Muhammadiyah membentuk generasi baru yang lebih berdaya secara sosial dan kultural. Dalam kerangka ini, praktik pengasuhan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai bentuk resistensi kultural terhadap kolonialisme, sekaligus sebagai upaya membangun sistem kesejahteraan yang lebih inklusif dan humanis. Dukungan filantropi lokal maupun internasional semakin menegaskan bahwa model ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki resonansi dalam diskursus global tentang kesejahteraan anak dan pendidikan emansipatoris (Fanon, 1963; Benthall, 2016).

Kajian mutakhir tentang panti asuhan Aisyiyah menunjukkan bahwa model pengasuhan berbasis Islam tidak hanya menekankan kepatuhan agama, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, tanggung jawab, dan orientasi masa depan anak. Studi Mahfud et al. (2023) tentang panti asuhan Aisyiyah menemukan bahwa pengasuhan Islam cenderung mengembangkan pola yang lebih otoritatif, adaptif, dan berorientasi pada perkembangan positif anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Jumriani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa panti asuhan Aisyiyah berperan dalam membina karakter religius melalui pembiasaan, keteladanan, nasihat, dan penguatan nilai sosial. Dengan demikian, panti asuhan Muhammadiyah dapat dibaca sebagai lembaga pendidikan sosial yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga membentuk habitus keagamaan dan moral anak.

Dengan membaca panti asuhan Muhammadiyah melalui perspektif filantropi Islam, pendidikan emansipatoris, dan transnasionalisme, tampak bahwa lembaga ini memiliki posisi ganda. Di satu sisi, ia hadir sebagai respons lokal terhadap kemiskinan, keterlantaran, dan keterbatasan akses pendidikan pada masa kolonial. Di sisi lain, ia juga menjadi bagian dari arus global mengenai perlindungan anak dan kemanusiaan. Relasi dengan Pro Juventute menunjukkan bahwa isu pengasuhan anak di Hindia Belanda tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan jejaring kemanusiaan lintas negara. Namun, berbeda dari model kolonial yang menekankan kontrol sosial, Muhammadiyah dan Aisyiyah mengembangkan pengasuhan berbasis nilai Islam, keluarga, komunitas, dan pendidikan karakter. Di sinilah letak kontribusi penting artikel ini: memperlihatkan bahwa filantropi Islam lokal dapat menjadi alternatif terhadap sistem kesejahteraan kolonial yang diskriminatif. Dalam konteks ini, model pengasuhan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai bentuk "counter-colonial social welfare model" yang menantang dominasi sistem kolonial.

Mereposisi Filantropi Islam dalam Konteks Kolonial

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah pada periode 1920-an hingga 1930-an tidak dapat dipahami semata sebagai respons terhadap kemiskinan, tetapi sebagai bagian dari pola yang lebih kompleks antara kolonialisme, filantropi keagamaan, dan jaringan kemanusiaan transnasional. Dalam konteks kolonial Hindia Belanda, kesejahteraan anak menjadi arena penting bagi negara kolonial untuk menjalankan fungsi kontrol sosial melalui institusi seperti panti asuhan dan lembaga re-edukasi. Seperti ditunjukkan dalam berbagai studi kolonial, intervensi terhadap anak-anak—terutama kelompok Eurasia dan pribumi terlantar—sering kali berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus mempertahankan hierarki rasial dan kultural yang menjadi fondasi kekuasaan kolonial.

Dengan demikian, praktik pengasuhan Muhammadiyah menghadirkan model alternatif yang berbeda secara mendasar. Jika sistem kolonial menempatkan anak sebagai objek kontrol, maka Muhammadiyah justru memposisikan anak sebagai subjek yang perlu dibina, dididik, dan diberdayakan. Pendekatan ini tidak hanya tercermin dalam kurikulum pendidikan yang menekankan integrasi antara agama, keterampilan, dan kemandirian, tetapi juga dalam sistem pengasuhan berbasis komunitas yang mengedepankan nilai solidaritas sosial. Dengan demikian, panti asuhan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai bentuk *counter-colonial social welfare*, yaitu upaya membangun sistem kesejahteraan yang tidak tunduk pada logika kontrol kolonial, melainkan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, fakta memperlihatkan bahwa filantropi Islam yang dikembangkan Muhammadiyah memiliki karakter yang berbeda dari praktik amal konvensional. Filantropi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai distribusi bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme institusional untuk membangun kapasitas sosial dan memperkuat masyarakat sipil. Dalam kajian filantropi Islam global, fenomena ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dapat berperan sebagai aktor penting dalam penyediaan layanan sosial, bahkan dalam kondisi di mana negara (dalam hal ini negara kolonial) tidak mampu atau tidak bersedia menyediakan layanan yang inklusif. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat diposisikan sebagai bagian dari tradisi filantropi Islam modern yang mengintegrasikan nilai keagamaan dengan praktik sosial yang terorganisasi.

Selain dimensi lokal, penelitian ini juga mengungkap adanya keterhubungan antara praktik pengasuhan Muhammadiyah dengan jaringan kemanusiaan global. Keterlibatan organisasi seperti Pro Juventute menunjukkan bahwa isu kesejahteraan anak di Hindia Belanda tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari arus transnasional yang lebih luas. Dalam perspektif transnasionalisme, hal ini menegaskan bahwa aktor lokal tidak hanya menerima pengaruh global secara pasif, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam membentuk dan menegosiasikan praktik sosial dalam konteks global. Muhammadiyah, dalam hal ini, tidak hanya mengadopsi praktik-praktik tertentu, tetapi juga mengadaptasinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat lokal.

Dari sudut pandang teori pendidikan kritis dan dekolonisasi, praktik pengasuhan dan pendidikan di

panti asuhan Muhammadiyah juga dapat dibaca sebagai bentuk resistensi kultural terhadap dominasi kolonial. Pendidikan yang menekankan kesadaran, kemandirian, dan pembentukan karakter mencerminkan upaya untuk membangun subjek yang tidak sekadar patuh terhadap struktur kekuasaan, tetapi mampu berpikir kritis dan mandiri. Dalam hal ini, panti asuhan Muhammadiyah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai ruang produksi identitas alternatif yang menantang narasi kolonial tentang inferioritas pribumi. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan tiga dimensi yang sering dikaji secara terpisah, yaitu kolonialisme, filantropi Islam, dan transnasionalisme. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kesejahteraan sosial di masyarakat kolonial tidak selalu didominasi oleh negara, tetapi juga dapat dibentuk oleh aktor lokal yang memiliki kapasitas untuk menciptakan sistem alternatif. Lebih jauh, studi ini memperluas pemahaman dalam historiografi kesejahteraan sosial dengan menegaskan bahwa filantropi keagamaan dapat berfungsi sebagai strategi adaptasi sekaligus resistensi dalam menghadapi struktur kekuasaan yang tidak adil. Pada akhirnya, analisis ini menempatkan Muhammadiyah dan Aisyiyah bukan hanya sebagai organisasi keagamaan atau sosial, tetapi sebagai aktor historis yang memainkan peran penting dalam membentuk praktik kesejahteraan anak di tingkat lokal sekaligus berkontribusi pada dinamika global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi pada diskursus internasional mengenai hubungan antara agama, kesejahteraan sosial, dan kekuasaan dalam masyarakat kolonial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sejak 1921 Muhammadiyah, melalui Aisyiyah, tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam membangun sistem kesejahteraan sosial alternatif bagi anak yatim dan terlantar di Hindia Belanda. Berbeda dengan model pengasuhan kolonial yang eksklusif, diskriminatif, dan berorientasi pada kontrol sosial, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan berbasis filantropi Islam yang menekankan nilai solidaritas, pendidikan, dan kemandirian. Transformasi dari pola pengasuhan berbasis keluarga menuju sistem panti asuhan terorganisasi menunjukkan proses institusionalisasi filantropi yang memperkuat kapasitas sosial masyarakat pribumi.

Lebih jauh, temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik pengasuhan Muhammadiyah tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena lokal, melainkan bagian dari dinamika transnasional dalam isu kesejahteraan anak. Keterhubungan dengan organisasi seperti Pro Juventute memperlihatkan adanya interaksi antara praktik lokal dan jaringan kemanusiaan global, yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah beroperasi dalam ruang sosial yang melampaui batas kolonial. Namun demikian, Muhammadiyah tetap mempertahankan karakter khasnya melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pengasuhan dan pendidikan.

Dengan menggunakan perspektif pendidikan kritis dan teori dekolonisasi, penelitian ini berargumen bahwa panti asuhan Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai arena resistensi kultural terhadap hegemoni kolonial. Pendidikan yang menekankan kesadaran, kemandirian, dan pembentukan karakter menunjukkan adanya upaya untuk membangun subjek yang tidak sekadar patuh, tetapi mampu berdaya secara sosial dan intelektual.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan historiografi kesejahteraan sosial dengan menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu kolonialisme, filantropi Islam, dan transnasionalisme. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang peran aktor lokal dalam membangun sistem kesejahteraan alternatif di tengah struktur kolonial yang represif. Selain itu, studi ini juga memiliki relevansi kontemporer dalam menunjukkan bahwa praktik filantropi berbasis komunitas dan nilai keagamaan dapat menjadi model pengasuhan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, kajian ini sangat bergantung pada sumber-sumber historis yang tersedia, terutama arsip kolonial dan dokumen organisasi, yang dalam banyak kasus merefleksikan perspektif institusional dan belum sepenuhnya menangkap pengalaman subjektif anak-anak sebagai aktor utama. Kedua, fokus penelitian ini lebih banyak pada wilayah Jawa sebagai pusat perkembangan Muhammadiyah, sehingga dinamika pengasuhan anak di wilayah lain di luar Jawa belum terbahas secara mendalam. Ketiga, keterbatasan akses terhadap arsip internal Muhammadiyah dan Aisyiyah secara komprehensif, serta sumber-sumber lisan, membatasi kemungkinan rekonstruksi yang lebih kaya mengenai praktik keseharian dalam panti asuhan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa aspek. *Pertama*, perlu dilakukan kajian mikro-historis atau pendekatan sejarah sosial yang lebih mendalam dengan memanfaatkan sumber lisan (oral history) untuk menggali pengalaman anak-anak dan pengasuh

secara lebih personal. *Kedua*, studi komparatif antar wilayah atau antar organisasi sosial-keagamaan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi praktik pengasuhan anak di masa kolonial. *Ketiga*, integrasi pendekatan interdisipliner, seperti antropologi, studi anak (*childhood studies*), dan kajian kesejahteraan sosial, dapat memperkaya analisis terhadap dimensi kultural dan psikososial dalam praktik pengasuhan. *Keempat*, penelitian lanjutan juga dapat menelusuri kesinambungan historis antara praktik pengasuhan Muhammadiyah di masa kolonial dengan model kesejahteraan sosial kontemporer, sehingga dapat memperlihatkan relevansi historisnya dalam menghadapi tantangan global saat ini.

REFERENSI

Benthall, J. (2016). *Islamic charities and Islamic humanism in troubled times.* Manchester University Press. https://doi.org/10.7765/9781784997458

Dirks, A. (2011). *For the youth: Juvenile delinquency, colonial civil society and the late colonial state in the Netherlands Indies, 1872–1942* (Doctoral dissertation, Leiden University).

Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth.* Grove Press.

Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia.* Brill.

Freire, P. (1968). *Pedagogy of the oppressed.* Continuum.

Howell, M., & Prevenier, W. (2001). *From reliable sources: An introduction to historical methods.* Cornell University Press.

Jumriani, Abbas, E. W., Isnaini, U., Mutiani, & Subiyakto, B. (2022). Pattern of religious character development at the Aisyiyah orphanage in Banua Anyar Village Banjarmasin City. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 14*(2), 2251–2260. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.1735

Kaur Khalsa, A. D. (2014). The road to the reformatory: (Mis)communication in the colonial court between judges, juveniles and parents in the Netherlands Indies, 1900–1942. In H. Ellis (Ed.), *Juvenile delinquency and the limits of Western influence, 1850–2000 (pp. 167–188)*. Palgrave Macmillan.

Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar ilmu sejarah.* Tiara Wacana.

Latief, H. (2013a). Filantropi dan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam, 28*(1), 123–139.

Latief, H. (2013). Islamic philanthropy and the private sector in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 3*(2), 175–201. https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201.

Levitt, P., & Glick Schiller, N. (2004). Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective. *International Migration Review, 38*(3), 1002–1039. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x

Luttikhuis, B., & Moses, A. D. (2012). Mass violence and the end of the Dutch colonial empire in Indonesia. *Journal of Genocide Research, 14*(3–4), 257–276. https://doi.org/10.1080/14623528.2012.719362

Mahfud, C., Rohani, I., Nuryana, Z., Baihaqi, M., & Munawir. (2023). Islamic education for disabilities: New model for developing Islamic parenting in Integrated Blind Orphanage of Aisyiyah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 13*(1), 115–142. https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.115-142

Mak, G. (2022). *Colonial children connected.* Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Murestiyanto, A. O. (2015). *Parenting patterns at Al-Barokah orphanage* (Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada, Faculty of Social and Political Sciences).

Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah: A reform movement.* Suara Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1962). *Sejarah 50 tahun Muhammadiyah.* Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Rodogno, D. (2012). *Against massacre: Humanitarian interventions in the Ottoman Empire, 1815–1914.* Princeton University Press.

Rosyida, H. D. Q. (2016). *Brothers and sisters relationship in the orphanage: Application of the role of the family as a form of parenting in the Islamic orphanage of R. M. Suryowinoto Yogyakarta* (Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada, Faculty of Cultural Sciences).

Shihab, A. (1998). *Membendung arus: Respons gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi Kristen di Indonesia.* Mizan.

Singer, A. (2008). *Charity in Islamic societies.* Cambridge University Press.

Soetjito, A. (2018). *Transnasionalisme: Peran aktor non-negara dalam hubungan internasional.* Obor.

Stoler, A. L. (2002). *Carnal knowledge and imperial power: Race and the intimate in colonial rule.* University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520927742

Syaifullah, M. (2010). *Filantropi Islam dan transformasi sosial: Studi atas amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan.* UIN Jakarta Press.

Tosh, J. (2015). *The pursuit of history: Aims, methods and new directions in the study of history* (6th ed.). Routledge.